

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan ini masyarakat beserta pemerintah mampu menjadikan Negara Indonesia yang lebih mandiri dalam pelaksanaan sistem pemerintahannya. Pembangunan ialah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana untuk mencapai suatu tujuan guna memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pembangunan ini dilakukan untuk memacu pemerataan pembangunan untuk meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan daerah tertentu memerlukan biaya yang cukup besar (Boediono, 2017: 37).

Jumlah penduduk termasuk kedalam faktor utama pembangunan ekonomi hal ini dikarenakan banyaknya jumlah penduduk akan memacu kegiatan produksi, konsumsi dari penduduk itu sendiri yang dapat menimbulkan permintaan agregat. Pada gilirannya, peningkatan konsumsi agregat memungkinkan usaha produktif berkembang, begitu pula perekonomian secara keseluruhan (Hasanur & Putra, 2017: 46). Penduduk merupakan orang pribadi atau sekumpulan anggota keluarga, masyarakat, warga negara dan himpunan kuantitas yang bertempat tinggal di suatu tempat dalam batas wilayah tertentu terlepas dari warga negara atau pun bukan (Wangtafendirra, 2023: 20).

Tetapi ada disamping itu penduduk juga memiliki dampak negatif pada pembangunan ekonomi yaitu apabila suatu daerah/negara tertentu mempunyai jumlah penduduk yang sangat sedikit maka penduduk tersebut tidak akan mampu memanfaatkan sumber-sumbernya dengan efisien sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduknya besar. Dalam keadaan seperti ini, usaha untuk mewujudkan produksi secara besar-besaran sangatlah tidak mungkin.

Sebaliknya, apabila suatu daerah menderita *over population*, maka penduduk dapat memanfaatkan tanah ataupun modalnya seefisien mungkin, namun demikian karena penduduk terlalu banyak maka hasil yang diterima oleh setiap orangpun menjadi semakin kecil. Berikut tabel 1.1 perkembangan penduduk Kota Jambi tahun 2008-2022.

**Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Produktif Kota Jambi Tahun 2008-2022**

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk produktif (Jiwa)	Rasio %
2008	467.408	191.661	0,41
2009	476.038	195.868	0,41
2010	534.500	218.401	0,40
2011	543.193	238.307	0,44
2012	551.711	226.607	0,41
2013	560.188	230.243	0,41
2014	568.062	235.722	0,42
2015	576.067	254.351	0,44
2016	583.487	281.750	0,48
2017	591.134	268.264	0,45
2018	598.103	276.000	0,46
2019	604.736	283.575	0,47
2020	611.353	265.205	0,43
2021	612.162	262.974	0,43
2022	619.553	276.359	0,45
<b>Rata-rata</b>	<b>527.154,4</b>	<b>247.019,1</b>	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Keterangan ( ) : Penurunan

Berdasarkan tabel 1.1 rata-rata jumlah penduduk produktif berfluktuasi tiap tahun dengan rasio rata-rata pertahun sebesar 0,43%. Dengan jumlah penduduk produktif yang tertinggi pada tahun 2016 sebesar 0,48%, sedangkan rasio terendah pada tahun 2010 sebesar 0,40%

Ada beberapa indikator yang dipergunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi salah satunya adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun (Hardiansyah, 2022: 59).

Alasan yang mendasari pemilihan PDRB sebagai suatu indikator mengukur pertumbuhan ekonomi ialah karena jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh aktivitas produksi didalam perekonomian daerah. Hal ini berarti peningkatan PDRB mencerminkan pula peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (Liow et al., 2022: 140). Berikut tabel 1.2 perkembangan PDRB Kota Jambi tahun 2008-2022.

**Tabel 1. 2 Perkembangan PDRB Kota Jambi Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2008-2022**

<b>Tahun</b>	<b>PDRB (Milyar Rp)</b>	<b>Perkembangan (%)</b>
2008	15.297,77	-
2009	16.429,74	0,30
2010	29.160.16	0,77
2011	30.856.66	0,05
2012	32.417.72	0,05
2013	34.012.10	0,04
2014	35.878.09	0,05
2015	36.753.52	0,02
2016	37.728.80	0,03
2017	38.833.87	0,03
2018	40.025.52	0,04
2019	41.812.35	0,04
2020	41.926.04	0,02
2021	42.906.66	0,02
2022	44.536.39	0,04
<b>Rata-rata :</b>	<b>34.571,69</b>	

*Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023*

Berdasarkan tabel 1.2 perkembangan PDRB Kota Jambi seiring setiap tahunnya mengalami fluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,08% yang dimana perkembangan tertinggi sebesar 0,77% pada tahun 2010.

Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sangat ditakuti oleh semua negara. Inflasi itu sendiri yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-menerus (Nuastiko et al., 2022: 1512). Pembicaraan mengenai inflasi mulai sangat populer di Indonesia ketika laju inflasi demikian tingginya yang tentu berdampak kepada minat beli dan pendapatan barang dan jasa masyarakat yang berpengaruh kepada kemiskinan masyarakat di suatu daerah, khususnya yang terjadi di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Tingginya inflasi tentunya dapat mempengaruhi disegala aspek termasuk pajak daerah. Perkembangan inflasi di Kota Jambi dapat dilihat tabel 1.3.

**Tabel 1. 3 Inflasi Kota Jambi Tahun 2008- 2022**

Tahun	Inflasi %
2008	11,57
2009	2,49
2010	10,52
2011	2,76
2012	4,22
2013	8,74
2014	8,72
2015	1,37
2016	4,54
2017	2,68
2018	3,02
2019	1,27
2020	3,09
2021	1,67
2022	6,39
<b>Rata-rata</b>	<b>4,87</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023*

Berdasarkan data di atas bahwa rata-rata inflasi di Kota Jambi sebesar 4,87%. Inflasi terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 1,27% dan inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 11,57%. Penerimaan pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber keuangan

yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan lain-lain yang sah. PAD di harapkan dapat menjadi salah satu sumber keuangan yang dapat diandalkan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah harus benar-benar menggali semaksimal mungkin potensi-potensi pendapatan di daerahnya, sehingga dalam pelaksanaannya tidak mengalami permasalahan yakni dalam hal pembiayaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak dan retribusi daerah merupakan dua sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), disamping penerimaan dari kekayaan daerah yang dipisahkan serta PAD lain-lain yang sah. Peranan PAD semakin tinggi dalam pendapatan daerah merupakan cermin keberhasilan tingkat kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan (Zuraida, 2012: 22).

Sumber penerimaan pendapatan asli daerah terbesar ialah pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Simanjuntak & Ginting, 2019: 185).

Pajak daerah mempunyai kontribusi terbesar dalam penerimaan PAD yang dimana menjadi penerimaan yang akan bisa pemerintah lakukan pembangunan daerah. Apalagi pemerintah daerah Kota Jambi sedang gencar dalam melakukan pembangunan infrastruktur

yang dimana penerimaan pajak daerah menjadi suatu kontribusi pendapatan asli daerah.

Berikut tabel 1.4 perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Jambi tahun 2008-2022.

**Tabel 1. 4 Perkembangan Pajak Daerah Kota Jambi Tahun 2008-2022**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Daerah (Juta)</b>	<b>Realisasi pajak Daerah (Juta)</b>	<b>Rasio capaian (%)</b>
2008	21.432.801	24.433.740	1,14
2009	26.523.341	28.842.152	1,08
2010	29.235.350	35.538.902	1,21
2011	49.623.280	59.570.219	1,20
2012	64.280.581	73.344.781	1,14
2013	81.317.140	91.476.549	1,12
2014	112.472.000	128.824.086	1,14
2015	190.882.000	147.889.448	0,77
2016	187.252.000	158.740.884	0,84
2017	198.940.000	201.429.750	1,01
2018	203.500.000	215.444.388	1,05
2019	242.090.000	255.915.037	10,57
2020	232.060.000	216.961.981	9,34
2021	297.860.000	244.016.777	(0,81)
2022	329.000.000	283.110.000	1,50
<b>Rata-rata</b>	<b>151.097.899,53</b>	<b>127.382.646,27</b>	

Sumber :Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah, 2023

Keterangan ( ) : Penurunan

Berdasarkan tabel 1.4 diatas rata-rata perkembangan pajak daerah sebesar 2.15%. Perkembangan pajak daerah tertinggi ada di tahun 2019 yaitu sebesar 10.57%. Yang terendah dan mengalami penurunan ada pada tahun 2021 sebesar 0.81%. Sehingga menyebabkan menurunnya pajak daerah di setiap daerah yang terdampak. Akan tetapi di tahun 2022 perkembangan penerimaan pajak daerah Kota Jambi mengalami peningkatan cukup drastis yaitu sebesar 1.50%.

Dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan PDRB Perkapita di Kota Jambi setiap tahunnya maka akan berdampak pula wajib pajak dan penerimaan pajak daerah seiring laju pertumbuhan perekonomian dan stabilitas politik dalam pembangunan daerah. Maka dari itu pajak daerah mempunyai kontribusi besar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

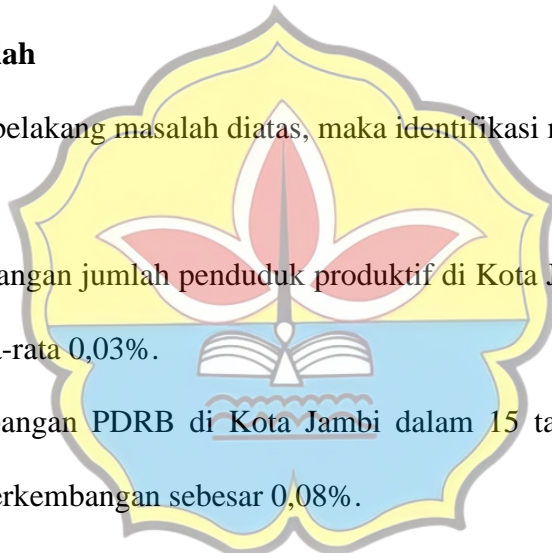
yang dimana menjadi penerimaan akan bisa pemerintah lakukan pembangunan daerah. Tetapi laju inflasi yang meningkat justru berdampak buruk kepada minat beli dan pendapatan barang maupun jasa yang berpengaruh kepada kemiskinan masyarakat/penduduk sekitar, dikarenakan akan kesulitan membeli barang/jasa yang dianggap penting karena harga terus menerus mengalami kenaikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik membahas penelitian yang berjudul **“Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Dan Inflasi Terhadap Pajak Daerah Kota Jambi Periode 2008-2022”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Rata-rata perkembangan jumlah penduduk produktif di Kota Jambi berfluktuasi dengan perkembangan rata-rata 0,03%.
- 2) Rata-rata perkembangan PDRB di Kota Jambi dalam 15 tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 0,08%.
- 3) Rata-rata pertumbuhan inflasi di Kota Jambi dalam 15 tahun terakhir berfluktuasi dengan rata-rata perkembangan sebesar 4,87%.
- 4) Rata-rata perkembangan pajak daerah Kota Jambi tahun 2008-2022 berfluktuasi dengan perkembangan 2.15%.



### 1.3 Rumusan Masalah

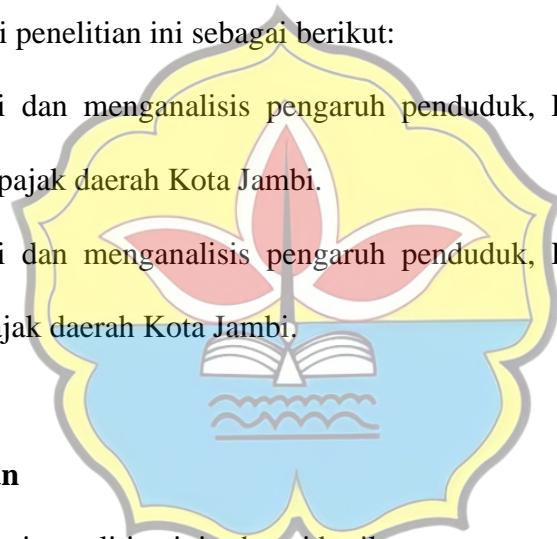
Berdasarkan latar belakang diatas dan identifikasi masalah dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti oleh penulis:

1. Bagaimana pengaruh penduduk, PDRB dan inflasi secara simultan terhadap pajak daerah di kota Jambi tahun 2008-2022.
2. Bagaimana pengaruh penduduk, PDRB dan inflasi secara parsial terhadap pajak daerah di Kota Jambi tahun 2008-2022.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penduduk, PDRB dan inflasi secara simultan terhadap pajak daerah Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh penduduk, PDRB dan inflasi secara parsial terhadap pajak daerah Kota Jambi.



### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Akademis

Secara teoritis bermanfaat bagi para pembaca dalam memperdalam pengetahuan dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pajak daerah Kota Jambi.

#### 2. Praktis

Secara praktis bermanfaat bagi para pengambil kebijakan dan pihak yang terkait, dan memberikan masukan kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal penyusunan kebijakan bagaimana menggali potensi PAD di Kota Jambi.



3. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan memperluas pola pikir secara ilmiah dalam bidang perpajakan.

